

# **STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh :**

**PUTRI RIZKI RAMADHANI**

**NIM: 105190083**

**Pembimbing:**

**Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H.**

**M. Bazly Ghaffari, S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H /2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# **STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh :

**PUTRI RIZKI RAMADHANI  
NIM: 105190083**

Pembimbing:

**Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H.  
M. Bazly Ghaffari, S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H /2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Rizki Ramadhani  
NIM : 105190083  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Syariah  
Alamat : JL. Raden Wijaya Rt 28 kel. Thehok kec. Jambi Selatan Kota  
Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: “**Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi**” adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya dapatkan dari skripsi ini.

Jambi, April 2023  
Yang Menyatakan,



Putri Rizki Ramadhani  
NIM: 105190083



KEMENTERIAN AGAMA  
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 10 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 23 Mei 2023

Mengesahkan:

Dean,



Syayuti Uta, S.Ag., M.H  
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang

: H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D  
NIP. 197509182006041001

()

Penguji I

: Yudi Armansyah, M.Hum  
NIP. 198606062015031007

()

Penguji II

: Syamsu Hadi J, S.Ag., M.HI  
NIP. 197407011999031004

()

Pembimbing I

: Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H  
NIP. 199204052018011003

()

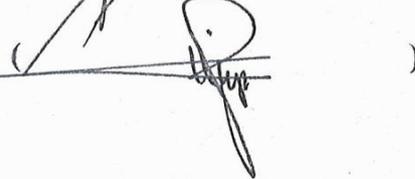
Pembimbing II

: M. Bazly Ghaffari, S.H., M.H  
NIDN. 2015019501

()

Sekretaris Sidang

: Dra. Choiriyah  
NIP. 196605081994032001

()

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فِيمَا رَحِمَهُ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S Al-Imran Ayat :159)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karuniaya. Karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan Rahmat dan Ridho-Nya Allah SWT.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya cintai, sayang dan hormati terutama sebagai tanda bakti kepada Ayahanda Amat Kani, Ibunda Nuriyah.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara/i saya Hardiyanto dan Hardianti yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga untuk teman baik saya yang telah menjadi tim sukses yaitu karina tri andika, wulan matari dan nadia novria.

Terima kasih juga untuk mamas saya yaitu eko prayogo yang selalu mendengarkan keluh kesah dalam mengerjakan skripsi ini.

Terima kasih juga untuk teman baik saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut serta membantu dan memberikan semangat yang tiada henti.

Terima kasih juga kepada senior dan teman seperjuangan yang telah memberikan nasihat dan dukungan demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.

Dan terima kasih sebesar-besarnya untuk guru-guru saya yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya selama ini sehingga skripsi ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari penerapan ilmu yang telah diberikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

**Nama** : Putri Rizki Ramadhani  
**Nim** : 105190083  
**Judul** : Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi

**Abstrak:** Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Dinas Sosial di Kota Jambi dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Strategi Pemerintah Dinas Sosial Kota Jambi tersebut menunjukkan bahwa adanya strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengurangi kemiskinan berupa memberikan bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Sembako, dan Bantuan Kesehatan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat yang di katakan sudah cukup efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Adapun faktor penghambat pemerintah Dinas Sosial Kota Jambi adalah adanya wabah Covid-19, Intren Masyarakat, Pendidikan yang Rendah dan Keluarga Berencana, dan adapun faktor mendukung adalah sama dengan Upaya atau Strategi yang telah di berikan berupa bantuan-bantuan di atas. Pada penelitian ini Peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.

**Kata Kunci:** Strategi, Kemiskinan, Kota Jambi

## ABSTRACT

**Nama** : Putri Rizki Ramadhani  
**Nim** : 105190083  
**Judul** : Government Strategy in Overcoming Poverty with Social Welfare Problems (PMKS) in Jambi City

**Abstract:** Government Strategy in Overcoming Poverty with Social Welfare Problems (PMKS) in Jambi City. This study aims to determine the Government's Strategy for Social Service in Jambi City in Overcoming Poverty with Social Welfare Problems (PMKS). The Jambi City Social Service Government strategy shows that there is a strategy carried out by the Jambi City Government in reducing poverty in the form of providing assistance such as Direct Cash Assistance (BLT), Family Hope Assistance (PKH), Basic Food Assistance, and BPJS Health Assistance and Healthy Indonesia Cards which are said to be quite effective in reducing poverty. The inhibiting factors for the Jambi City Social Service government are the Covid-19 outbreak, Community Intren, Low Education and Family Planning, and the supporting factors are the same as the Efforts or Strategies that have been given in the form of the assistance above. In this study, researchers used a qualitative descriptive method using observation data collection techniques, interviews, documentation.

**Keywords:** Strategy, Poverty, Jambi City

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi”**

Tak lupa pula shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Studi Sarjana (S.1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Adanya atau terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Sua'aidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III pada Fakultas

Syariah UIN STS Jambi

6. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.i., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi
7. Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I pada skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Bazly Ghaffari, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II pada skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang ikut serta atas partisipasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

Semua belah pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, dimohon kritik dan sarannya bagi penulis agar skripsi ini bisa lebih sempurna lagi. Dan atas segala arahan, bimbingan, bantuan maupun motivasinya semoga mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah SWT.

Jambi, April 2023  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kerangka Konseptual.....	10
D. Landasan Teoritis.....	12
E. Tinjauan Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian strategi.....	18
B. Pengertian Pemerintahan .....	20
C. Pengertian Kemiskinan .....	22
D. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
	A. Sejarah Umum Dinas Sosial Kota Jambi.....	27
	B. Visi Dinas Sosial Kota Jambi.....	28
	C. Misi Dinas Sosial Kota Jambi .....	29
	D. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi .....	32
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Jambi.....	34
	B. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Pendukung dan Menghambat Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi .....	40
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran .....	59
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>CURICULUM VITAE</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Rumah Tangga Miskin/Kemiskinan.....	6
Tabel 1.2 : Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .....	7
Tabel 1.3 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi.....	27
Tabel 1.4 : Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Jambi .....	32
Tabel 1.4 : Dokumentasi Struktur Organisasi .....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR SINGKATAN

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. DINSOS      | : Dinas Sosial                            |
| 2. GEPENG      | : Penanganan Gelandangan dan Pengemis     |
| 3. PMKS        | : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
| 4. PSKS        | : Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial     |
| 5. SKP         | : Sasaran Kinerja Pegawai                 |
| 6. STS         | : Sulthan Thaha Saifuddin                 |
| 7. SWT         | : Subhannahu Wata'ala                     |
| 8. SKPD        | : Satuan Kerja Perangkat Daerah           |
| 9. SAW         | : Shallallahu Alaihi Wasallam             |
| 10. SAT-POL PP | : Satuan Polisi Pamong Praja              |
| 11. SDA        | : Sumber Daya Alam                        |
| 12. UIN        | : Universitas Islam Negeri                |
| 13. PKH        | : Program Keluarga Harapan                |
| 14. KIS        | : Kartu Indonesia Sehat                   |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial pada saat ini tentu menjadi pembincangan dan topik yang menarik untuk di kaji mengingat saat ini banyak nya warga yang masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi.

Negara memiliki kewajiban menjamin kesejahteraan sosial agar semua kalangan masyarakatnya dapat merasakan kesejahteraan sosial secara adil dan merata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 yang berbunyi “kesejahteraan sosial kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, anak terlantar dan anak jalanan menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial, Demikian halnya dengan pemerintah daerah Kota Jambi.

Membahas masalah kesejahteraan sosial fakir miskin salah satu nya. Terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada pasal 1 yang berbunyi: “Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang

layak bagi dirinya sendiri nya dan keluarganya, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.”

Masyarakat miskin merupakan golongan yang sangat rentan mengalami kekurangan dan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan makanan sehat dan bergizi seimbang. Tingkat pendapatan di kota jambi yang tidak sebanding, membuat masyarakat miskin di Kota Jambi hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan pangan mereka.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sedang di tangani oleh Dinas Sosial di Kota Jambi ada 7 kategori dan 22 jenis PMKS yaitu:

#### 1. KEMISKINAN

- a. Rumah Tangga Miskin
- b. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- c. Keluarga Dengan Rumah Tidak Layak Huni
- d. Keluarga Rentan Sosial Ekonomi

#### 2. KETELANTARAN

- a. Balita Terlantar
- b. Anak Terlantar
- c. Lanjut Usia Terlantar
- d. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi

#### 3. KECACATAN

- a. Penyandang Cacat

#### 4. KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU

- a. Pengemis
- b. Gelandangan
- c. Mantan Narapidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak Cipta milik UIN Suntho Jambi  
State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

- d. Anak Jalanan
- e. Anak Berhadapan Dengan Hukum
- f. Tuna Susila
- g. Korban Penyalahgunaan NAPZA
- h. Penyandang HIV/AIDS

## 5. KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI & DISKRIMINASI

- a. Korban Tindak Kekerasan
- b. Pekerja Migran Terlantar

## 6. KETERPENCILAN

- a. Komunitas Adat Terpencil

## 7. KORBAN BENCANA

- a. Korban Bencana Alam
- b. Korban Bencana Sosial

Tantangan pembangunan kesejahteraan sosial yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya daya dorong perekonomian, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, sosial secara memadai dan wajar.<sup>1</sup>

Padahal pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi tentang yaitu: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

<sup>1</sup>Wisnu Andrianto dkk, "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 202-209.

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Pemahaman di atas mengisyaratkan bahwa seseorang yang disebutkan miskin pada dasarnya merupakan orang yang memiliki kekurangan berupa sumberdaya-sumberdaya material ketika akan terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial yang ada, atau seseorang yang tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau standar hidup yang kurang layak, olehnya itu konsep kemiskinan masih didominasi oleh suatu sudut pandang, yakni “kemiskinan pendapatan”.

Sedangkan kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan, Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai rumah tangga miskin di kota jambi.<sup>2</sup>

Kemiskinan Menurut Kementerian Sosial, berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial RI No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yaitu:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.

<sup>2</sup>Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, 2008, hlm.3.

7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidakbaik/kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.<sup>3</sup>

Permasalahan yang saya ambil tentang kemiskinan atau kategori rumah tangga miskin (warga miskin atau masyarakat miskin) di kelurahan pal merah dan dehok, yang terjadi di kota jambi menurut observasi dinas sosial kota jambi mengambil kesimpulan beberapa faktor permasalahan yaitu:

1. Kemiskinan (*proferty*), situasi orang miskin mempunyai tanda-tanda sebagai berikut: pertama rumah mereka reot dan di buat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim. Ekonomi keluarga bercirikan gali lubang tutup lubang. *Kedua*, pendapatan mereka tidak menentu dan sangat rendah.
2. Keterasingan (*isolation*). Kelompok miskin dapat terasing karna tempat tinggalnya yang secara geografis terasing atau karena mereka tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi.
3. Kerentanan (*vulnerability*). Dalam menghadapi paceklik keluarga miskin mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dengan menjual barang-barang yang dimiliki dan laku dijual, utang pada tetangga yang lebih mampu, atau mengurangi makan mereka baik dari segi jenis dan frekuensinya. Keadaan darurat membuat tidak hanya membuat keluarga miskin menjadi lebih miskin, tetapi juga rawan dari berbagai macam penyakit, yang tidak jarang dapat membawa kematian.
4. ketidakberdayaan (*powerlessness*). Orang miskin tidak berdaya menghadapi rentenir atau orang-orang lain yang sering mengeksploitasi mereka. Mereka juga tidak berdaya menghadapi polisi atau aparat negara lain yang sering tidak ramah terhadap mereka.<sup>4</sup>

<sup>3</sup><http://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/4/14/kriteria-fakir-miskin-dan-orang-tidak-mampu-menurut-kemensos>, di akses tanggal 19 febuari 2022.

<sup>4</sup>Wildana Wargadianta, *Islam & pengetasan Kemiskinan Malang*, UIN-Maliki Press, 2011, hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Tabel 1. 1

Data rumah tangga miskin/kemiskinan tahun 2021-2022 di kota jambi.<sup>5</sup>

Kecamatan/Kelurahan	2021	2022
Alam Barajo	1060	1071
Danau Sipin	1600	1603
Danau Teluk	700	709
Jambi Selatan	1100	1130
Jambi Timur	2350	2363
Jelutung	1660	1669
Kota Baru	1450	1455
Pall Merah	1730	1748
Pasar Jambi	390	396
Pelayangan	660	668
Telanai Pura	1069	1079
<b>Grand Total</b>	<b>13.769</b>	<b>13.892</b>

Table 1. 2

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan bapak idham Maulid, selaku penyuluh ahli bedah, di kantor dinas kota jambi, 1 Maret 2023.

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial  
Tahun anggaran 2021-2022.<sup>6</sup>

Jenis Layanan	2021	2022
Anak Balita Terlantar (ABT)	- jiwa	6 jiwa
Anak Telantar	99 jiwa	8 jiwa
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ADH)	- jiwa	32 jiwa
Anak Jalanan (ANJAL)	74 jiwa	117 jiwa
Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	359 jiwa	200 jiwa
Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	3 jiwa	- jiwa
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	- jiwa	5 jiwa
Lanjut Usia Terlantar	791 jiwa	1699 jiwa
Penyandang Disabilitas	517 jiwa	880 jiwa
Tunasusila	27 jiwa	- jiwa
Gelandangan	116 jiwa	223 jiwa
Pengemis	221 jiwa	29 jiwa
Pemulung	15 jiwa	2 jiwa

<sup>6</sup>Hasil wawancara bersama bapak Budi, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Maret 2023

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	- jiwa	- jiwa
Korban Penyalahgunakan NAPZA	- jiwa	- jiwa
Korban Trafficking (Korban Pedagangan Orang)	85 jiwa	- jiwa
Korban Tindak Kekerasan	18 jiwa	- jiwa
Orang Terlantar	- jiwa	45 jiwa
Eks.psykotik	87 jiwa	150 jiwa
<b>Total Pelayanan</b>	<b>2.326 jiwa</b>	<b>3.396 jiwa</b>

Jika berbicara tentang *das sollen* (peraturan hukum yang bersifat umum) kasus-kasus kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial itu sepenuhnya masih tanggung jawab pemerintah sosial dan masyarakat setempat agar menciptakan kenyamanan dan ketertiban pengguna jalan raya dan masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari sesuai di dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 yang berbunyi: kesejahteraan sosial kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terkait dengan *das sein* (suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat) tapi pihak pemerintah sosial diharapkan harus menciptakan strategi agar dapat membuat ide-ide agar mempersempit kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial di Kota Jambi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan permasalahan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi?
2. Faktor-faktor apa saja yang Pendukung dan Penghambat Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Kemudian dari rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang pendukung dan penghambat Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi.

#### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu pemerintahan hal ini tentunya mengenai bagaimana strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya di Kota Jambi.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pembaruan ilmu pemerintahan secara nasional, khususnya mengenai cara menanggulangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kasus pemasalahan kemiskinan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Jambi.

#### D. Kerangka Konseptual

Pengertian kemiskinan secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda. membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin (*poor*), sangat miskin (*very poor*) dan termiskin (*poorest*). Impres nomor XII Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Raskin, penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahun.

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

##### 1. Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratus = miller dan ag = memimpin*), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan pengguna kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.<sup>7</sup>

Strategi adalah pemerintahan perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.<sup>8</sup>

Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu proses rencana pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai. serta

<sup>7</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CV, Andi Offset, 2008, hlm. 3.

<sup>8</sup>Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 29.

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan.

## 2. Pemerintah

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar dari berbagai produk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenang untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.<sup>9</sup>

## 3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat warga negara belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari negara.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan masyarakat, keluarga, kelompok atau seseorang yang tidak bisa melakukan fungsi secara sosial dikarenakan terdapat suatu kesulitan secara rohani, jasmani, atau sosial. Data PMKS merupakan jenis permasalahan sosial seperti kelantaran, kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, eksploitasi, dan diskriminasi.<sup>10</sup>

## F. Landasan Teoritis

<sup>9</sup>Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Cendekia Insani, 2006, hlm. 46.

<sup>10</sup>Iskarimah Hidayatin, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi, Vol. 3, No. 8, 2019, hlm. 24-31.

Landasan teori dalam penulisan ilmiah ini berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif.

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”<sup>11</sup>

komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan konsep peran, dan fakta bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. Yang terakhir mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan mengakomodasi berbagai kepentingan.<sup>12</sup>

## 1. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai supremasi hukum sebagai landasan konstitusinya. Konsep negara hukum tersebut berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 268.

<sup>12</sup>B. J. Biddle, “Recent Developments in Role Theory”, *Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia*, 1986, hlm. 67.

<sup>13</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

Negara yang berdiri berdasarkan hukum memiliki 4 (empat) asas utama, yaitu: asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), asas persamaan (*het gelijkeheidsbeginsel*), asas demokrasi (*het democratischebeginsel*), dan asas bahwa pemerintahan dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*het beginsal van de diende overhead, government for the people*).<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini penulis memakai teori kepastian hukum karena dalam penulisan di dalam penelitian harus belandasan hukum agar lebih efektif untuk mempererat landasan dalam penulisan.

## 2. Teori Peran (*role theory*)

Adapun beberapa ahli yang mengartikan arti penting teori peran sebagai berikut:

Charles P. Loomis mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan dalam status dan peran tertentu. Peran status adalah aspek aktif dari posisi dan fungsi serta proses statis dari struktur. Peran juga merupakan perilaku seseorang dalam status tertentu. Pada intinya, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah perangkat kewajiban.<sup>15</sup>

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang di terapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan atau ketentuan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami keburukan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan tidak efektif dibanding individu lain..<sup>16</sup>

## G. Tinjauan Penelitian

Di dalam langkah penting peneliti dalam memulai aktivitas penelitiannya adalah melakukan penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan

<sup>14</sup>Edi Hudiata, *Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 302.

<sup>15</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>16</sup>Gusti Indah Pratiwi, "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru" Jom FISIP, Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hlm. 4.

langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang diangkat. Bahkan tinjauan penelitian terdahulu juga sangat diperlukan sebelum peneliti menemukan permasalahan, Harus dipahami bahwa tinjauan penelitian terdahulu harus dimasukkan pada jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian pustaka (*library research*).

## 1. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dimana peneliti mencari atau mencari data tertentu, peneliti yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mencari pengetahuan tentang suatu topik penelitian pada waktu tertentu. Metode ini bermaksud untuk meneliti kondisi dari suatu objek atau terjun langsung ke pemasalah tersebut dan penelitian adalah kunci, serta teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat produktif dengan mengarahkan ke dalam generalisasi.<sup>17</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan sebuah penelitian ini dengan menetapkan suatu lokasi atau melakukan penelitian langsung serta terjun langsung ke tempat lokasi di Kantor Dinas Sosial di Kota Jambi.

## 3. Jenis dan sumber data

### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer melalui observasi lapangan dan wawancara. Walaupun data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain data sekunder dapat diperoleh dari sumber kedua

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hlm. 43.

berupa dokumen dan fakta secara lisan maupun tertulis. Data sekunder ini digunakan sebagai data pelengkap atau pendukung dari data primer.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dibawa langsung dari peneliti ke sumbernya, tanpa ada perantara. Secara khusus, data diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi (Observasi) pada Strategi Pemerintahan dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi.

### b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan oleh penulis sendiri, misalnya dari literatur (Catatan Kantor Dinas Sosial dan Struktur Dinas Sosial) atau publikasi lainnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi meliputi Pencatatan Kantor Dinas Sosial Kota Jambi dan Struktur Kantor Dinas Sosial. **C. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sedangkan sumber data yaitu berbentuk perkataan maupun tindakan yang didapat melalui wawancara. Sumber data peristiwa (situasi) yang didapat melalui observasi. Sumber data dari dokumen didapat dari instansi terkait. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

## 1. Metode Pengumpulan Data

### 1. Metode observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang: Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung. Metode ini dilakukan dengan jalan terjun langsung kedalam lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai dengan pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi data yang dibutuhkan. Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung data yang ada dilapangan, terutama tentang data yang ada di Dinas Sosial Kota Jambi.<sup>18</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Metode wawancara yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data, Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, dengan cara mengorganisasikan tanya jawab secara langsung dengan responden dan dengan mendengarkan secara langsung serta mencatat dengan seksama Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber data yang relevan yaitu Orang Tua, Anak, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, kata responden.<sup>19</sup>

## 3. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen tersebut dapat berupa artikel, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen tertulis seperti catatan harian, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen visual seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen berupa karya seperti karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan sejenisnya. Studi literatur tambahan untuk penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## 2. Pengumpulan Data

### 1. Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

<sup>18</sup>Gaszper, *Total Quality Manajemen*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Vol. 2, 2006, hlm. 28.

<sup>19</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm. 70.

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

Bab I Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulisan mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab II Menguraikan tentang tinjauan umum Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi

Bab III Merupakan hasil penjelasan profil, visi misi dan tugas dari kantor dinas sosial yang merupakan tempat peneliti melakukan penelitian.

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Di dalam bab ini diuraikan mengenai Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi.

Bab V Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

## BAB II



## TINJAUAN UMUM STRATEGI PEMERINTAH MENANGGULANGI KEMISKINAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

### A. Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Kemudian pendapat selanjutnya.

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.<sup>20</sup>

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya yang di tujuh.

Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.<sup>21</sup>

Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai “*action stage*”

<sup>20</sup>Ali Hasan, *marketing Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 29.

<sup>21</sup>David, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Selemba Empat, 2004, hlm. 14.

dari manajemen strategis. Pengimplementasikan strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi.

Penentuan strategi, yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi, mengembangkan alternatif strategis, dan menentukan yang terbaik strategi yang akan diadopsi.

Penentuan arah dan tujuan dasar organisasi merupakan bentuk perumusan strategi. Dalam perumusan strategi, organisasi merumuskan misi, visi, tujuan, dan nilai dasar organisasi. Perumusan strategi merupakan kegiatan untuk merancang atau menciptakan masa depan (*creating the future*). Aktivitas perumusan strategi membutuhkan ketajaman visi dan intuisi. Orang yang memiliki ketajaman visi dan intuisi dapat melihat realitas masa depan yang melampaui realitas masa kini. Kekuatan visi ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kebesaran organisasi dimasa depan.<sup>22</sup>

Perumusan strategi merupakan tahap pembangunan mental, moral, dan spiritual. Tahap berikutnya berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti pemrograman, penganggaran dan implementasi. Tahap pembangunan fisik akan jauh lebih mudah apabila moral, mental, dan spiritual sudah terbangun kokoh. Dengan demikian terlihat bahwa rencana strategis ternyata merupakan sebuah konsep perencanaan untuk jangka menengah yang bersifat strategi dan juga komprehensif yang dapat diterapkan baik untuk pengembangan kegiatan bisnis maupun untuk mendorong proses pembangunan suatu institusi pemerintah atau swasta, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita

<sup>22</sup>Zuchri Abdussamad, *Trategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah*, Jurnal Manajemen, Vol. 20, No. 2, 2006.

dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis.<sup>23</sup>

Strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian strategi, penulis menyimpulkan bahwa strategi merupakan seluruh tindakan (dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan), yang dilaksanakan atau dijalankan agar kegiatan yang dilakukan mencapai target atau tujuan. Strategi berisi gambaran dari berbagai pelaksanaan kegiatan dan keputusan yang diambil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Strategi dapat juga dikatakan sebagai perwujudan dari sebuah perumusan visi dan misi masing-masing lembaga atau organisasi.

## B. Pemerintah

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (*to order*) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.

Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum,

<sup>23</sup>Mustari Mula, *Trategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal strategi administrasi, Vol. 3, No. 11, 2022.

tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.<sup>24</sup>

Peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia secara signifikan selama sejarah umat manusia. Peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin keamanan kehidupan sosial. Sebagaimana masyarakat kita menjadi lebih kompleks, pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan lebih mendominasi. Kontroversi mengenai betapa besar, berkuasa, dan betapa dominasinya pemerintah akan terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup manusia.

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (*pejabat=ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *government* (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.<sup>25</sup>

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai eksekutif dan legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan yang telah ditetapkan.

### C. Kemiskinan

<sup>24</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 94.

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jurnal Sinar Grafika, 2014, Vol. 1, No. 1, hlm. 210.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat, Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan.

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi, Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat.<sup>26</sup>

Masalah kemiskinan memang telah lama menjadi problema ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran mengenai kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, sebab

<sup>26</sup>Nano Prawoto, *Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangi*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, No. 1, 2009, hlm. 56–68.

hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.<sup>27</sup>

Masalah kemiskinan bukan hanya melibatkan negara dunia ketiga melainkan juga negara yang sedang berkembang. Hal ini karena disamping kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya secara layak (kemiskinan mutlak) namun juga berkaitan dengan perbandingan yang timpang antara penduduk berpenghasilan tinggi dengan penduduk berpenghasilan yang paling rendah. Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (gepeng), dan pengangguran. Kelompok miskin ini akan menimbulkan problema yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya.

Pada umumnya penduduk yang tergolong miskin adalah "golongan residual", yakni kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasikan secara khusus, seperti Mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang sangat minimal, termasuk memanfaatkan pemberian bantuan bagi kebutuhan dasar manusia, dan perlindungan hukum atau perundang-undangan yang tidak kurang memihak mereka.

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Salah satu langkah nyata adalah melalui penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen

<sup>27</sup>Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10. No. 1, 2008, hlm. 1-11.

peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan, untuk mengukur jaringan sosial dapat mencakup lembaga-lembaga sosial memperoleh sumberdaya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola aset menjangkau sumberdaya, berpartisipasi dalam program anti kemiskinan.<sup>28</sup>

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial.

#### D. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut pemaparan dinas Sosial Kota Jambi yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, ketersaingan, dan perubahan lingkungan (secara mendadak).<sup>29</sup>

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan, Keluarga bermasalah

<sup>28</sup>Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, hlm. 9, 2010.

<sup>29</sup>Gusti Ayu Ambarawati, *Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) di kota sukabumi*, Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, Vol. 4, No. 1, 2019 hlm, 1-11.

sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan 28 anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Pendapatan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin membaik pendapatan masyarakat maka akan semakin besar pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pendapatan keluarga miskin dapat menjadi kunci dalam memajukan kesejahteraan masyarakat yang merata dan lebih berkeadilan. Bila pendapatan keluarga miskin bertambah, secara otomatis maka perekonomian suatu daerah pun akan mengalami perubahan yang positif.<sup>30</sup>

Sedangkan dengan pendapatan tersebut untuk hidup dengan memiliki jumlah tanggungan yang banyak dan biaya hidup seperti barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat maka pendapatan tersebut bisa dikatakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, padahal kebutuhan harus terpenuhi apalagi yang menyangkut kebutuhan dasar bagi keluarga seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial harus lebih di perluas dan ditingkatkan agar

<sup>30</sup>Heriberta, *aktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga miskin di Kota Jambi*, Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 16, No. 3, 2021, hlm, 20.

yang telah tercapai dan diterapkan terus berjalan dan lebih menjadi luas, tertib, dan mengurangi daya malas dari Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sedang terjadi saat ini.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaan terkait dengan menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Jambi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Umum Dinas Sosial Kota Jambi

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°30'45" sampai dengan 01°41'41" Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah kota Jambi berbatasan langsung dengan.

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
3. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

**Table 1. 3**  
**Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi.<sup>31</sup>**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Pasar Jambi	4	4,02
2.	Jelutung	7	7,92
3.	Jambi Timur	9	15,94
4.	Telanaipura	6	22,51
5.	Kota Baru	5	36,11
6.	Jambi Selatan	5	11,41
7.	Danau Teluk	5	15,7
8.	Pelayangan	6	15,29
9.	Alam Barajo	5	41,67
10.	Danau Sipin	5	7,88
11.	Paal Merah	5	27,13
		62	205,5

<sup>31</sup> Sumber: *Dinas Sosial Kota Jambi*, 2022.

Dinas Sosial Kabupaten Kota Jambi dibentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan daerah dibidang sosial. Pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan dibidang sosial. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang sosial. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang sosial. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>32</sup>

## B. Visi Dinas Sosial Kota Jambi

Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Sosial (DINSOS) Kota Jambi saat ini dan harapan yang akan diwujudkan di masa yang akan datang maka Visi Dinsos Kota Jambi adalah sebagai berikut: Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya. Maksud dari pernyataan Visi tersebut yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan sosial yang mengutamakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pernyataan Visi Dinas Sosial Kota Jambi sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kota Jambi.<sup>33</sup>

Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Sosial Kota Jambi merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi. Visi Dinas Dinas Sosial Kota Jambi sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kota Jambi Untuk mencapai

<sup>32</sup>Profil Dinas Sosial Kota Jambi, *tentang sejarah Dinas Sosial Kota Jambi*.

<sup>33</sup>Profil Dinas Sosial Kota Jambi, *tentang sejarah Dinas Sosial Kota Jambi*.

visi, perlu ditunjang oleh nilai-nilai yang telah berkembang dan hidup dalam suatu organisasi sebagai pendorong semangat untuk berkarya dan berkarsa, sekaligus merupakan pedoman yang diyakini serta harus selalu dihayati dan diamalkan dalam melaksanakan tugasnya

### C. Misi Dinas Sosial Kota Jambi

Terwujudnya visi yang dikemukakan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinsos Kota Jambi. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinsos Kota Jambi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Dinsos Kota Jambi memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinsos Kota Jambi menetapkan sebanyak 3 misi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - b. Membangun kemandirian dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
  - c. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Bingkai Kearifan Lokal.
- F. Tujuan**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jambi dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam rangka mencapai misi sebagaimana telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

dikemukakan di atas, maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, selanjutnya disusun tujuan setiap bidang yaitu sebagai berikut:

a. Bidang sosial

1. Meningkatkan rehabilitasi sosial
2. Meningkatkan perekonomian penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
4. Meningkatkan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

b. Bidang Pemsos

1. Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
2. Penanganan bencana alam dan sosial
3. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Sosia

c. Bidang Tenaga Kerja

1. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Meningkatkan Kesempatan Kerja
3. Meningkatkan Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenaga kerja

d. Bidang Transmigrasi

1. Meningkatkan Pengembangan wilayah transmigrasi
2. Meningkatkan kesejahteraan trasmigrasi lokal maupun regional

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu setahun. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.



#### D. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi

Adapun Struktur Organisasi Kepegawaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan pada Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari.<sup>34</sup>

**Table 1.4**

Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Jambi adalah:

Kepala dinas	Drs. Noviarman, ME
Sekretaris	Nofianto, ME
Kasubbag umum dan kepegawaian	Siti Arafah Siregar, SH
Kasubbag perencanaan dan program	Gustini Rina, SH
Kasubbag keuangan dan barang milik daerah	Yulia Puspita Hayati, A.Md
Kabid perlindungan jaminan sosial dan warga migran	Azwar, SE
Kasi perlindungan jaminan sosial anak terlantar	Marsiani Fera, SH,MH
Kasi perlindungan jaminan sosial fakir miskin	Dian Anggraini, SE
Kasi bantuan masyarakat dan warga negara migran	Idham Kholid, SE
Kabid rehabilitasi sosial	M. Toyib, S.Ag
Kasi rehabilitasi sosial PMKS terlantar	Drs. Apun Hayati
Kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya	Budi Wahyudi, SE
Kasi kerjasama antar lembaga dan kemitraan rehabilitasi sosial	Ade Candra, SH
Kabid pemberdayaan sosial	Drs. Ahmad Abas
Kasi pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga	Sumarlin , S.Kom
Kasi pengembangan kelembagaan masyarakat kepahlawanan dan restorasi sosial	Salahuddin Al Ayubi, SE.MM

<sup>34</sup>Profil Dinas Sosial Kota Jambi, *tentang sejarah Dinas Sosial Kota Jambi*.

Kasi pengumpul sumbangan dan komunitas adat terpencil	Meilina Noovrianti,SE
Kasi perlindungan korban bencana alam	Drs. Darmawansyah
Kasi penanganan korban bencana alam	Baina,A.KS
Kasi pemberdayaan	Aminah,SE,MM
kesiapsiagaan bencana	Alamsyah Powa. SE

Tabel 1.5

Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi.<sup>35</sup><sup>35</sup>Dokumentasi Profil Dinas Sosial Kota Jambi, *tentang sejarah Dinas Sosial Kota Jambi*.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi

Strategi Pemerintah Daerah mengatasi kemiskinan tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 dan 34 bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dituangkan dalam peraturan pemerintah upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial adalah dengan memberikan bantuan sosial. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 tahun 2012 tentang Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian lapangan kemiskinan di bidang rumah tangga miskin di kota Jambi mencapai 13.892 yaitu mencapai 14% yang dikatakan meningkat dan dengan adanya beberapa faktor pendukung membuat kemiskinan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berkurang dan sedikit terjangkau. Sedangkan sejauh ini blm di katakana efektif karena Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus meningkat karena terlalu banyak masyarakat memilih pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang cepat sehingga memilih menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional membuat Empat Strategi yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan dilaksanakan diseluruh Indonesia. Empat Strategi tersebut ialah:

1. Meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi  
Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan lapangan kerja yang produktif, menjaga produktivitas sektor pertanian menjadi fokus utama tanpa meninggalkan sektor lainnya. Meningkatkan infrastruktur wilayah tertinggal.

Seperti yang di sampaikan bapak Idham Maulid selaku penyuluh sosial ahli beda di kantor dinas sosial Kota Jambi:

“Untuk mengatasi kemiskinan kami selaku pemerintah memberikan bantuan Tunai dan Non Tunai bagi masyarakat baik pangan maupun uang tunai untuk pendidikan dan kesehatan mereka. Pelaksanaanya melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau KIS. Selanjutnya kami berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan keterampilan serta mengembangkan kewirausahaan.”<sup>36</sup>

2. Menetapkan kelompok menengah ke bawah dan melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan.

Wawancara dengan bapak Idham Maulid selaku penyuluh sosial ahli beda:

Dalam pengentasan kemiskinan kami pemerintah kota jambi, giat bekerja sama dengan PKH untuk melakukan banyak hal, baik menguatkan daya

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Idham Maulid, selaku penyuluh sosial ahli beda, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 1 Februari 2023.

pembimbing masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dan bisa membuat usaha bersama.<sup>37</sup>

3. Melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Kabupaten dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Peningkatan anggaran perlindungan sosial serta peningkatan infrastruktur dan investasi ekonomi.
4. Melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat agar implementasi berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Wawancara dengan Bapak Idham Maulid selaku penyuluh sosial ahli beda:

“Untuk peningkatan perlindungan Sosial pemerintah memberikan bantuan sosial yang sudah lama berjalan di wilayah kami ini. Ikut arahan pemerintah pusat. Bantuan sosial yang kami berikan Rastra kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) yang digunakan untuk pendidikan dan kesehatan penerimanya”.<sup>38</sup>

Dalam penuntasan kemiskinan di Kota Jambi, Pemerintah Daerah melakukan beberapa strategi yang telah dilaksanakan dalam penuntasan kemiskinan dan hal ini didapat berdasarkan wawancara dengan pemerintah daerahnya yaitu adanya bantuan Sosial baik berupa uang Tunai maupun Non Tunai yang direalisasikan melalui Program Keluarga Harapan. Untuk kesehatan pemerintah memberikan bantuan dengan (KIS) Kartu Indonesia Sehat.

Dari titik itu maka sudah bisa dilihat bahwa strategi pemerintah Kota Jambi saling berkaitan satu sama lain dalam membuat gagasan cukup baik, karena

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Idham Maulid, selaku penyuluh sosial ahli beda, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 1 Februari 2023.

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak Idham Maulid, selaku penyuluh sosial ahli beda, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 1 Februari 2023.

pemerintah mempunyai cita-cita untuk memangkas pengangguran yang ada di kota jambi dengan melakukan berbagai pelatihan kerja agar keahlian masyarakat dapat terasah dengan baik sehingga masyarakat dapat menggunakan keahliannya itu untuk membuat industri di kota jambi yang lebih beragam, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memajukan roda perekonomian di kota jambi.

Kemiskinan yang meluas merupakan tantangan terbesar dalam upaya melaksakan proses pembangunan menuju tercapainya Produk Domestik Bruto tinggi dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi dengan pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti terhadap masyarakat miskin jika tidak diringi dengan penurunan yang signifikan dalam pendistribusian atau pemerataannya.

Melihat penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2021-2022 relatif kecil tentu hal ini menjadi tantangan untuk pemerintah Provinsi Jambi mencari strategi dan upaya lain yang lebih efektif dan efisien dalam menekan tinggi angka penduduk miskin di Provinsi Jambi. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 42.100 jiwa dan terendah berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.300 jiwa. Untuk tahun 2021 jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kota Jambi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 48.950 jiwa dan jumlah penduduk miskin terkecil berada pada Kota Sungai Penuh sebanyak 2.550 jiwa. Dari kondisi diatas terlihat pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi State Islamic University of SunnarThaha Saifuddin Jambi

Jambi merupakan jumlah penduduk miskin terkecil di Provinsi Jambi namun pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Jambi menjadi jumlah miskin terbanyak di Provinsi Jambi. Fenomena ini lebih disebabkan arus urbanisasi ke Kota Jambi dalam kurun waktu 17 tahun cenderung meningkat karena Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang mempunyai peranan sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum dan perekonomian.

Berbagai kebijakan dan strategi untuk pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi jumlah penduduk miskin masih tetap besar. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah selama ini belum maksimal dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Menghadapi permasalahan tentang kemiskinan di kota jambi dewasa ini terdapat perkembangan pemikiran yang menarik yaitu dimana pihak pemerintah dan seluruh bangsa sudah tidak lagi menganggap tabu membahas permasalahan yang dimaksud secara terbuka. Sementara itu, berbagai studi tentang masalah kemiskinan menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak saja mencakup aspek ekonomi saja akan tetapi juga dimensi sosial, budaya, dimensi struktural atau politik, yang menyebabkan masalah kemiskinan itu menjadi kompleks dan rumit. Realitas kemiskinan kemudian timbul menjadi human problem yang telah mengusik dan menguras tenaga serta pikiran banyak orang.

Penduduk yang masih berada dibawah garis suatu kemiskinan mencakup mereka yang masih berpendapatan rendah dan tidak memiliki penghasilan tetap bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Permasalahan kemiskinan harus dipecahkan dengan penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

yang harus di upayakan agar masyarakat menikmati kehidupan seperti yang diharapkan guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Sehubungan kompleksitasnya permasalahan kemiskinan maka diperlukan penanganan dan komprehensif lintas sektor dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta stakeholders terkait. Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh untuk memenuhi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Sebagai salah satu wilayah di Pulau Sumatera, Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang angka kemiskianannya masih cukup besar. Provinsi Jambi masih merupakan salah satu provinsi yang masih banyak menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonomi, seperti tingginya jumlah penduduk miskin. angka kemiskinan di Provinsi Jambi khususnya diwilayah Kota mengalami penurunan setiap tahunnya. Dimulai tahun 2007 hingga tahun 2022, angka kemiskinan di wilayah kota terus mengalami penurunan. Namun kondisi serupa tidak dijumpai di wilayah desa dimana dari tahun 2007 hingga tahun 2022 jumlah penduduk miskin cenderung meningkat

Pengangguran merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan ekonomi. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka akan timbul masalah besar dan kompleks, karena akan berdampak terhadap ekonomi dan menggambarkan sumber daya yang terbuang percuma, mendorong terjadinya keresahan sosial dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHAA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi  
Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

kriminal serta dapat pula menjadi faktor penghambat proses pelaksanaan pembangunan nasional.

## **B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Yang Dihadapi Pemerintah Kota Jambi Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

### **1. Faktor Penghambat**

Sulitnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memerangi kemiskinan di dalam kehidupannya merupakan salah satu hambatan yang di hadapi Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Akibatnya masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut, mereka hanya semata-mata ingin mendapat bantuan dana, dan tersebut tidak diproduktifkan.

Adapaun beberapa faktor penghambat yang terjadi di Kota Jambi pada tahun 2021-2022 adalah:

#### **a. Covid-19**

Yang di mana jumlah pengangguran akibat berkurangnya lapangan pekerjaan bagi kepala keluarga mengakibatkan pemasukan atau penghasilan tidak ada karena sudah pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pekerjaan membuat kemiskinan khusus nya rumah tangga miskin mengalami peningkatan.

#### **b. Intern Masyarakat**

Intern masyarakat merupakan di mana masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang rendah dan memiliki tingkat kemalasan yang memacu untuk menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga membuat kemiskinan di kota jambi khusus nya terjadi di rumah tangga miskin mengalami peningkatan karena di dalam diri mereka sudah tertanam kemalasan.



### c. Pendidikan yang rendah

Pada saat ini Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di kota Jambi di ketahui memiliki pendidikan rendah seperti hanya sebatas Sekolah Dasar (SD), maka di dari situ mereka hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan seadanya.

Terbukti dengan hasil wawancara bersama bapak Idham Maulid selaku penyuluh sosial ahli beda:

Masyarakat miskin di kota Jambi masih kebanyakan tamatan SD dan SMP . mereka lebih senang bekerja mencari uang baik menangkap ikan maupun membantu orang tuanya. Bagi mereka pendidikan masih belum penting. Karena yang kami lihat rata-rata tingak ekonomi masyarakat rendah. Dan itu yang membuat mereka malas sekolah lebih enak kerja dapat uang dan bisa bantu orang tua”<sup>39</sup>.

Pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik juga memungkinkan penduduk yang miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat hal terpenting dari mereka ialah tenaga mereka. Kemiskinan juga menghambat mereka untuk mengkonsumsi nutrisi bergizi dan dengan rendahnya tingkat pengetahuan yang mereka miliki, mereka kurang bisa memelihara lingkungan yang menyehatkan. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang didapat mereka peroleh.

### d. Keluarga Berencana

Bebicara keluarga berencana (KB) ini termasuk menjadi faktor penyebab

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Idham Maulid, selaku penyuluh sosial ahli beda, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 1 Februari 2023.

karena memiliki anak melebihi 4 orang anak dengan pendapatan kepala keluarga tidak menentu mengakibatkan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan, maka dari situ kepala keluarga kebanyakan memilih menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar cepat mendapatkan uang dengan menjadi pengemis, pemulung, badut, pengamen, dan masih banyak lagi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan usaha kerja, masyarakat di ajak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Kemiskinan juga berdampak pada tingkat rumah tangga. Terjadinya kemiskinan juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan pada suatu rumah tangga akibat tuntutan yang harus dipenuhi namun terdapat keterbatasan ekonomi. Kekerasan ini khususnya yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Pada tingkat kewilayahan, meningkatnya angka kemiskinan dapat menyebabkan meningkatkan risiko bahaya lingkungan seperti kriminalitas. Selain itu, juga menyatakan bahwa kemiskinan yang merupakan masalah kompleks dapat meningkatkan biaya untuk pembangunan ekonomi pada suatu wilayah menjadi lebih besar yang bisa saja secara tidak langsung dapat menghambat dilakukannya kebijakan pembangunan ekonomi yang maksimal.

#### e. Terbatasnya Sumberdaya Manusia

sumber daya manusia merupakan hal yang kerap kali dihadapi salah satunya di Dinas Sosial Kota Jambi, di mana sebagian pengurus dan pegawai yang ada di Dinas Sosial Kota Jambi masih perlu ditambah dan diberikan



pelatihan guna mencapai pekerjaan yang efektif dan efisien. Sumberdaya manusia kita terbatas, kalau harus semuanya ditampung di sini tentu tidak bisa, saat ini kita terbatas jumlah yang bekerja, tidak bisa harus mencakup semuanya atau rangkap jabatan jadi tidak efektif semuanya tidak bekerja sesuai bidang kemampuan masing-masing sehingga tidak berjalan dengan baik untuk untuk kami memerlukan bantuan SDM yang betul-betul memupuni dan mampu memberikan waktunya dalam menjaga dan mengurus kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

## 2. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung untuk menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada saat ini pemerintah dinas sosial Kota Jambi memiliki beberapa upaya untuk mengurangi kemiskinan agar tidak meningkat, adapun faktor pendukung yang sedang di jalankan yaitu:

### 1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan merupakan salah satu yang menjadi faktor pendukung untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami kesulitan kebutuhan sehari-hari maka di beri bantuan program keluarga harapan agar meringankan kehidupan mereka dari kekurangan.

### 2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sejak adanya covid-19 pemerintah memberikan bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin karena ada beberapa kepala keluarga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), jika masyarakat memiliki kartu keluarga dan kartu kepemilikan penduduk berdomisili kota jambi maka masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Terbukti dengan hasil wawancara bersama bapak Idham Maulid selaku penyuluh sosial ahli beda:

kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan yaitu rumah tangga yang memiliki penghasilan di bawah UMR dan telah daftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang berkerja sebagai pegawai negeri sipil dan abdi negara. Dan tidak memiliki batasan usia asal tetapi dengan syarat sudah menikah.<sup>40</sup>

### 3. Bantuan pangan sembako.

Bantuan pangan sembako juga menjadi bantuan yang sering di berikan oleh dinas sosial untuk membantu masyarakat miskin seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng agar masyarakat bisa menghidupi keluarga nya dengan baik.

### 4. Bantuan kesehatan berupa BPJS dan kartu indonesia sehat (KIS).

Bantuan kesehatan juga di berikan pemerintah Kota Jambi agar masyarakat miskin dapat berobat dengan gratis menggunakan kartu BPJS dan kartu indonesia sehat.

### 5. Pelatihan bimbingan teknis (BIMTEK)

Tujuan untuk meningkatkan kompetensi mayarakat miskin yang di mana materi yang di berikan meliputi membangun tim kerja efektif, teknik komunikasi dalam konteks pelayanan prima dan kepuasan masyarakat, dengan adanya BIMTEK ini mayarakat di latih untuk melakukan kegiatan seperti memasak, menjahit, berjualan, dan lain-lainnya, untuk masyarakat yang berjualan maka akan di bantu dengan grobak atau etalase agar bisa menghasilkan tambahan keperluan sehari-hari.

<sup>40</sup>Wawancara denga Bapak Idham Maulid, selaku penyuluh sosial ahli beda, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 1 Febuari 2023.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jambi melalui Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Program Penyelenggaraan Padat Karya Produktif. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah Kota Jambi maupun daerah telah berupaya membuat atau menciptakan pola-pola perluasan kesempatan kerja, salah satunya dibidang kewirausahaan mandiri yaitu penciptaan kewirausahaan baru dan pelatihan-pelatihan guna untuk menumbuhkembangkan kemampuan yang dimiliki.

Seperti yang di sampaikan Budi Wahyudi, SE selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya di kantor dinas sosial Kota Jambi:

“saat ini pemerintahan dinas sosial kota jambi salam mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam penyegahan yang memiliki KTP dan KK Kota Jambi akan di bantu di daftarkan kebantuan raskin, BLT dan PKH, tetapi dalam perjanjian penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mereka lakukan seperti mengemis, mulung, dan berkeliaran di jalan”.<sup>41</sup>

Pada data ini dampak dari faktor menghambat dari penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Kota Jambi bisa di kata kan meningkat dari 2021-2022 karena banyak nya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak ingin bekerja sehingga berkeliaran di jalanan. Dengan bertambah banyaknya penduduk miskin di Kota Jambi sehingga banyak menimbulkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di setiap tahunnya, seperti yang diketahui masyarakat yang memiliki masalah sosial.

Seperti yang di sampaikan Budi Wahyudi, SE selaku kasi rehabilitasi sosial

<sup>41</sup>Wawancara denga Bapak Budi, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Febuari 2023.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya di kantor Dinas Sosial Kota Jambi:

“Di sampaikan langsung oleh kasi rehabilitasi sosial faktor penghambat yang di peroleh dari penyandang masalah kesejahteraan sosial sendiri adalah di dalam diri mereka yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki kemalasan untuk berkerja sehingga mereka mau bekerja yang menghasilkan pendapatan dengan cepet, karena dari penyandang masalah kesejahteraan sosial itu berpendidikan yang rendah tidak dapat bekerja dengan baik”.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi saat melakukan penangkapan dan selanjutnya dibawa ke kantor untuk melakukan pendataan dan diberikan pengarahan-pengarahan tentang larangan mengemis, gelandangan dan PMKS lainnya.

Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat warga negara belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari negara. Padahal pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ada faktor yang Pendukung Pemerintah Dinas Sosial dalam menjalankan yang menjadi hak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Jambi untuk berjalan efektif.

Seperti yang di sampaikan Budi Wahyudi, SE selaku kasi rehabilitasi sosial

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Budi, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Februari 2023.

penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di kantor Dinas Sosial Kota Jambi:

“dari pemerintah dinas sosial faktor pendukung itu sendiri karena telah di fasilitaskan oleh negara untuk melakukan beberapa hal yang mampu membuat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi jera yang berupa merazia dan memonitoring untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang masih berkeliaran di lapangan tetapnya di lampu merah dan di tempat keramaian memakai 2 mobil patrol dari dinas sosial, dan membina agar tidak kembali ke jalan”.<sup>43</sup>

Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Jambi yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Kota Jambi. Sudah dilakukan razia di lokasi lokasi yang biasanya menjadi tempat anak-anak jalanan atau anak terlantar, pengemis, gelandangan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial berkeliaran, tetapi tidak lama kemudian mereka kembali bergeladangan di Kota Jambi dan Keberadaan mereka memang sangat mengganggu wajah Kota Jambi dan kenyamanan warga. Ada juga yang mangkal dipinggir jalan, tempat parkir mobil, lampu merah, dan pusat pertokoan.

Seperti yang di sampaikan ibu apun hayati selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS terlantar di kantor dinas sosial Kota Jambi:

“pencegahan untuk memonitoring PMKS yang seperti penjual, badud, pengamen, pengemis, dan PMKS lainnya itu di lakukan penyitaan atribud dan sejauh ini di ketahui mereka ada beberapa yang bukan warga yang berdomisli dari Kota Jambi itu yang membuatmeresakan dan menimbulkan begah pemerintah karena mereka mengulangi kembali terus-menerus.”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa saat berhadapan dengan pengemis, dinas sosial berpatroli di lampu merah atau di tempat umum. Lalu, tim patroli pergi ke kantor untuk mengumpulkan data.

<sup>43</sup>Wawancara denga Bapak Budi, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Febuari 2023.

<sup>44</sup>Wawancara denga ibu apun hayati, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS terlantar, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Febuari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara, dinas sosial dapat menanyakan nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang sosial ekonomi, daerah asal, pekerjaan, status keluarga dan pokok persoalan dalam kegiatan pendataan.

Pendekatan Persuasif, Pendekatan persuasif yaitu pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang lain. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pendekatan Komunikatif, Bahasa komunikatif adalah bahasa yang biasa digunakan pada wilayah dimana sedang terjadi proses komunikasi, tidak terpaku pada satu bahasa saja, mudah diterima, mudah dipahami dan mudah untuk ditanggapi atau mendapatkan feedback. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan bahasa komunikatif sebagai bahasa pengantar dalam membina anak jalanan. Dengan bahasa yang komunikatif maka akan mengurangi rasa kaku, monoton, dan akan lebih menarik bagi komunikan, pada akhirnya diharapkan mampu mencapai tujuan dalam proses pembinaan.

Dalam perkembangan program pembinaan lanjutan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dengan lembaga yang terkait, terdapat tahap program pembinaan rehabilitasi setelah proses identifikasi dan assesment pada tahap pembinaan lanjutan yang memungkinkan anak jalanan untuk di rujuk ke lembaga Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Pengguna Narkoba atau disingkat dengan (YKP2N) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Jambi. Tidak hanya bekerja sama dengan panti Sosial rehabilitasi YKP2N tetapi bekerja sama pula dengan panti sosial harapan mulia Jambi. Jika anak jalanan diketahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

merupakan anak yang nakal dan mempunyai masalah dengan hukum dibawah naungan Kementerian Sosial.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan keuangan yang memunculkan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial terus mengalami peningkatan di Kota Jambi.

“disampaikan oleh bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial kota jambi data yang di peroleh mengatakan penyandang masalah kesejahteraan sosial saat ini dikatakan terus meningkat/bertambah dengan alasan mencari makan dan semakin di razia mereka tidak jera dan semakin rame di beberapa titik di kota jambi”<sup>45</sup>.

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sosial tersebut memerlukan dukungan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana dan manajerial. Berbagai aspek tersebut apabila dapat dipenuhi, maka tujuan program dapat dicapai secara optimal, dan sebaliknya. Dengan berkembangnya pengemis diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan pengemis tersebut.

Mengenai fungsi dan tugas Dinas Sosial Kota Jambi terjun langsung ke lapangan untuk melakukan patrol dan merazia penyandang masalah kesejahteraan

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Budi, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Febuari 2023.

sosial (PMKS) di Kota Jambi, seperti yang di sampaikan oleh bapak Budi Wahyudi, SE yaitu:

“iya betul, pemerintah menggerakkan anggota untuk terjun langsung ke lapangan setiap hari patrol di seluruh daerah yang ada di Kota Jambi, tetapi kendala pertama yang di hadapi Dinas Sosial adalah antara penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemerintah Dinas Sosial mengalami kucing-kucingan atau sembunyi-sembunyi. Kendala kedua yang di hadapi adalah Dinas Sosial tidak dapat menghukum atau mendenda penyandang masalah kesejahteraan sosial karena dari peraturan daerah karena tidak memiliki PPMS (penyidik pegawai negeri) yang bisa melakukan mendenda atau memberi hukuman kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial karena PPMS hanya ada di satpol pp”.<sup>46</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan menyatakan bahwa upaya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi dalam mengatasi masalah sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Jambi sudah dikatakan kurang efektif baik dalam hal ini Dinas Sosial mampu menertibkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di pertengahan kota maupun disekitar akan tetapi upaya tersebut dianggap belum cukup membantu mengatasi masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berlatar belakang ekonomi bermasalah.

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Budi, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Febuari 2023.

Dampak pada masyarakat rumah tangga miskin beberapa tahun lalu adalah covid-19 yang di mana jumlah pengangguran akibat berkurangnya lapangan pekerjaan bagi kepala keluarga mengakibatkan pemasukan atau penghasilan tidak ada karena sudah pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pekerjaan membuat kemiskinan khususnya rumah tangga miskin mengalami peningkatan, di situ lah peran atau strategi pemerintah menanggulangi nya dengan memberikan bantuan yang berupa bantuan langsung tunai (BLT), bantuan program sosial untuk rakyat (Bansos), bantuan program keluarga harapan (PKH), Pangan dan kesehatan sampai berjalan saat ini. Untuk menanggulangi kemiskinan di kota jambi pihak melakukan beberapa upaya terutama penurunan beban rumah tangga masyarakat miskin.

Program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial terhadap masyarakat Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Program bantuan yang disalurkan pemerintah untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tentu saja bertujuan untuk membantu mengatasi masalah sosial yang dialami oleh masyarakat baik dalam jangka panjang ataupun pendek, menyatakan bahwa beberapa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai program bantuan seperti mendapatkan pendidikan dan pelatihan, rehabilitasi sosial dan bimbingan khusus, memperoleh jaminan sosial berupa uang tunai dan bahan sembako serta memberi UEP (Usaha Ekonomi Produktif), akan tetapi untuk masalah PMKS di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Pemerintah Dinas Sosial mengatakan apa yang di lakukan untuk mengurangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi belum efektif. Seperti hasil wawancara dengan bapak budi wahyudi dari Dinas Sosial Kota Jambi:

Belum di katakana efektif karena selagi peraturan daerah belum dapat di revisi yang boleh melakukan denda dan hukuman oleh PPMS maka strategi pemerintah belum berjalan efektif saat ini.<sup>47</sup>

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai masalah sosial terhadap pengemis Kebijakan merupakan suatu prinsip atau tindakan yang diambil untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan, baik yang dialami oleh perorangan, kelompok maupun masyarakat. Kebijakan terkadang diambil karena suatu kondisi atau situasi masalah yang memerlukan suatu tindakan atau penanganan secepat mungkin.

Bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi mempunyai tujuan atau prioritas utama dengan menjadikan Kota Jambi yang tertib tanpa adanya pengemis serta mencegah banyak pengemis yang beredar di pertengahan kota maupun disekitarnya agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik di kawasan masyarakat sekitar, seperti hasil wawancara dengan bapak budi wahyudi Dinas Sosial yaitu:

“penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengganggu masyarakat karena sering meminta rokok, makan, dan minum, mengganggu ketertiban kota seperti manusia grobak yang sering mangkal di depan universitas Batanghari itu sudah dilakukan membubaran tetapi masih ada

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Budi, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Febuari 2023.

lagi karena terlalu memakan jalan umum”.<sup>48</sup>

Upaya pemerintah seperti program bantuan yang disalurkan, dan waktu pelaksanaan penanggulangan masalah sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan berbagai program bantuan yang disalurkan seperti adanya pendidikan dan pelatihan, bantuan sembako, serta adanya bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), hanya ada kegiatan penertiban (razia) yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka memulangkan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke tempat asal mereka masing-masing. Waktu pelaksanaan penanggulangan masalah sosial terhadap pengemis dalam hal ini kegiatan penertiban (razia) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi yaitu dua kali dalam sehari seperti pagi hari dan sore harinya. Dalam melakukan penertiban Dinas Sosial mempunyai jam yang relatif atau diluar jam yang semestinya tergantung dari adanya laporan masyarakat yang masuk mengenai keberadaan pengemis tersebut.

Fungsi Primer atau Fungsi Pelayanan Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus memperhatikan kepuasan dari penerima pelayanan dalam hal ini masyarakat. Pemerintah harus mengupayakan untuk menciptakan kepuasan bagi para masyarakat, jika masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang telah diterima dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas dari pemerintah. Sarana dan

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Budi, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS lainnya, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Februari 2023.

prasarana juga harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang pelayanan yang ada di kantor. Seperti hasil wawancara dengan ibu apun hayati dinas sosial yaitu:

“masih banyak nya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlantar dan susah di kendalikan karena kekeh nya dari diri sendiri yang membuat pemerintah dinas sosial harus mengupayakan bagaimna kerena segala usaha dan program telah di lakukan dan malah bertambah banyak karena dari meraka malah mengajak lebih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial agar berkerja sama dengan mereka yang telah enak dengan penghasilan cepat dan menjadi terlantar di jalan sekitar Kota Jambi yang berasal dari luar Kota Jambi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial”<sup>49</sup>

Dan sesuai faktanya, saya mengetahui bahwa saat ini pemeritah sedang mengoptimalkan kinerjanya dalam hal pelayanan dan pemberdayaan kepada anak-anak terlantar. Dan Pemerintah juga optimis ditahun-tahun mendatang akan ada perubahan yang besar, bahkan dapat mencetak angka di bawah rata-rata untuk jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Jambi. Maka dari beberapa usaha dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menangani kasus ini, walaupun baru sedikit dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakatnya, melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran adalah problem (masalah) yang terus menumpuk. Bertambah dari tahun ke tahun persoalan pengangguran buka sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang kita miliki.

kurang kondudif atau cenderung mempersulit bagi pengembangan usaha

<sup>49</sup>Wawancara dengan ibu apun hayati, selaku kasi rehabilitasi sosial PMKS terlantar, di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, 6 Febuari 2023.

yang masih lesu (kurang semangat). Disamping masalah-masalah tersebut diatas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan, pendapatan, karyawan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan, permasalahan diatas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan (Decision Marker). Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan atau penggangguran bersifat multidimesi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multi dimensi pula. Permasalahan mengenai kesempatan kerja menjadi semakin penting dan mendesak karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. Terutama untuk menentukan kesadaran yang tinggi bahwa masalah pengangguran merupakan tantangan besar yang harus di tangani bersama. Sebab, kunci keberhasilan semua pihak, yakni pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat luas.

Pemanfaatan terhadap berbagai sumberdaya baik sumberdaya alam, modal dan sumberdaya manusia membutuhkan perencanaan yang baik sehingga nantinya dapat dikelola secara baik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Maka dibutuhkanlah perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan daerah mengingat telah digulirkannya desentralisasi dan otonomi daerah dengan munculnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

sudut pandang kemiskinan sudah mencakup diluar kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya yang di sebut sebagai kemiskinan struktural, menurutnya kemiskinan struktural adalah: “Kemiskinan yang di derita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia buat mereka”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutba Jambi



Mengacu pada uraian tersebut diatas, bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran, konsep kemiskinan mempunyai ruang lingkup yang berbeda antara lain kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Lebih lanjut gambaran tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah penyusun uraikan dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Jambi dengan cara antara lain, Dalam penanganan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial itu bisa berupa Bantuan sosial yang merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah yaitu oleh Dinas Sosial Kota Jambi kepada masyarakat miskin dan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Strategi Pemerintah seperti program bantuan yang disalurkan, dan waktu pelaksanaan penanggulangan masalah sosial terhadap Strategi Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan berbagai program bantuan yang disalurkan seperti adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Sembako, Bantuan Kesehatan berupa BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Pelatihan Bimbingan Teknis (BIMTEK).

2. Faktor Penghambat yang di hadapi Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah adanya covid-19, intren masyarakat, pendidikan yang rendah, dan keluarga berencana. Yang

membuat kemiskinan dan PMKS meningkat di Kota Jambi. Baik dari faktor pendukung adanya program yang telah dilakukan dan berjalan efektif dan Sejahter ini Upaya atau Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Jambi, di bidang kemiskinan sejahter ini telah berjalan baik atau efektif dengan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan pangan, dan Bantuan kesehatan BPJS dan kartu indonesia sehat. Dan di bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejahter ini blm di katakana efektif karena Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial terus meningkat karena terlalu banyak masyarakat memilih pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang cepat sehingga memilih menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran dan Prasarana di lapangan perlu dilengkapi, karena tanpa sarana dan prasarana akan memperlambat proses pemerintah dalam mengurangi peningkatan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Jambi.
2. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan lapangan pekerjaan di segala bidang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota jambi agar tidak kekurangan di rumah tangga nya, Perlu adanya kerja sama antara Pemerintah dengan masyarakat untuk mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Jambi, Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada lapangan supaya terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan Dinas Sosial harus lebih menegaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi agar tidak lagi melakukan perbuatan dan kesalahan yang sama.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.
- B, J. Biddle. "Recent Developments in Role Theory". *Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia*. 1968.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Stia. 2014.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010.
- Danang wicaksono. *Peranan dinas sosial dalam menggulqngi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kota lubuklinggau*. Jurnal ilmiah studi pemerintahan, 2022.
- Denny David. *Peranan dinas sosial dalam menggulqngi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kota manado*. Jurnal Governance, 2021.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2008.
- Gaszper, *Total Quality Manajemen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. 2006.
- Iskarimah Hidayatin, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi, 2019.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Alumni. Malang. 2009.
- Marina Damuhu. *Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan PMKS di kota manado*. Jurnal ilmu pemerintahan, 2018.
- Nurmi Chatim. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Cendekia Insani. 2006.
- Nunung Nurwati. *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2009.

Suharisman, Muslim, *Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi*, Kementerian Sosial RI.Jakarta Timur, 2015.

Soekijo Notoatmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta 1998.

Profil Dinas Sosial Kota Jambi, *tentang sejarah Dinas Sosial Kota Jambi*, 2020.

Yudi Armsndysh,M.Hum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syariah Press, 2022.

## B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## C. Jurnal & Internet:

B. J. Biddle, *Recent Developments in Role Theory*, Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia Vol. 6, No. 2, 1986.

Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Edi Hudiata, *Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk memberikan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6, No. 2, 2017.

Gusti Indah Pratiwi. Charles P. Loomis, “Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru”. Jom FISIP. Vol. 3. No. 1, 2017.

Heriberta, *aktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga miskin di Kota Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol.16. No.3, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suitha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suitha Jambi



- Nano Prawoto, *Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangi*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 9, No. 1, 2009.
- Nunung Nurwati, *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran. Vol. 10. No. 1, 2008.
- Gusti Ayu Ambarawati, *Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) di kota sukabumi*. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan. Vol. 4, No. 1, 2019.
- Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, hlm. 9, 2010.
- Wisnu Andrianto dkk, *Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2. No. 2, 2014.
- Zuchri Abdussamad, *Trategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah*, Jurnal Manajemen, Vol. 20, No. 2, 2006.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B-325/D.II.1/PP.00.11/1/2023  
Lampiran :-  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

Jambi, 12 Januari 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Sosial Kota Jambi  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Putri Rizki Ramadhani**  
NIM : 105190083  
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Strategi Pemerintahan dalam Menanggulangi Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi.**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Sosial Kota Jambi  
Waktu Penelitian : 12 Januari 2023 – 12 April 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*



An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

**Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.**

1780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

## DAFTAR INFORMAN

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Budi Wahyudi, S.E	Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya
2	Bapak Idham Maulid, S.E	Selaku Penyuluh Sosial Ahli Bedah.
3	Ibu Drs. Apun Hayati	Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial PMKS Terlantar
4	Ibu intan	Selaku Staff di Dinas Sosial
5	Ibu tina	Selaku Staff di Dinas Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## LAMPIRAN

### INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

- A. Pedoman Wawancara Adapun Pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara sebagai berikut :
1. Bagaimana sejarah berdirinya Dinas Sosial Kota Jambi?
  2. Bagaimana perkembangan yang dicapai Dinas Sosial Kota Jambi?
  3. Apa Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Jambi?
  4. Bagaimana strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kota jambi?
  5. Bagaimana cara pemerintah mengurangi kemiskinan di kota jambi?
  6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang membuat kemiskinan digolongkan PMKS terus bertambah di kota jambi?
  7. Di golongan mana tingkat kemiskinan berhak menerima bantuan dari pemerintah kota jambi?
  8. Apa saja program yang telah dijalankan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di kota jambi?
  9. Apakah pemerintah dinas sosial terjun langsung ke lapangan untuk menanggulangi kemiskinan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota jambi?
  10. Bagaimana dampak kemiskinan di kota jambi saat ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN

Wawancara bersama bapak Idham Kholid, SE penyuluh sosial ahli bedah



Wawancara bersama bapak Budi Wahyudi, SE kasi rehabilitas PMKS



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Wawancara bersama ibu Drs. Apun Hayati kasi rehabilitasi PMKS terlantar



### Wawancara bersama ibu intan sebagai staff PMKS Dinas Sosial Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Wawancara bersama ibu Gustini Rina sebagai staff bidang kemiskinan



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Putri Rizki Ramadhani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 11-12-2000  
NIM : 105190083  
Alamat : Jalan Raden Wijaya Rt 28  
Kelurahan Thehok Kecamatan  
Jambi Selatan Kota Jambi  
No. Telp/HP : 0822-5558-8312  
Nama Ayah : Amat Kani  
Nama Ibu : Nuriyah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 147/IX Sungai Jirat (Tahun 2013)
2. SMP Swasta Islam Al-Arief Muaro Jambi (Tahun 2016)
3. SMA Swasta Islam Al-Arief Muaro Jambi (Tahun 2019)

### C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Swasta Islam Al-Arief Muaro Jambi
2. Ketua Keamanan Osa Al-Arief Muaro Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi